

LAMPIRAN IA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER- ... /PJ/2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017
TATA CARA PENELITIAN BUKTI
PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA
PERUBAHANNYA

**SURAT PERMOHONAN PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU
PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau
Bangunan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....
.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :

Bertindak sebagai

- Wakil Wajib Pajak
 Kuasa dari Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan :

- Skema Non-KIK DIRE
 Skema KIK DIRE *)

dalam daftar terlampir untuk dilakukan penelitian.

Demikian disampaikan.

....., 20.....
Wakil Wajib Pajak/Kuasa,

Tanda Tangan

.....

Keterangan Pengisian

- *) Khusus pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam skema KIK tertentu, dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:
1. fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK;
 2. keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan *Special Purpose Company* atau KIK dalam skema KIK tertentu;

3. surat pernyataan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau KIK dalam skema KIK tertentu dengan meterai.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN IB
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER- ... /PJ/2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 18/PJ/2017
TATA CARA PENELITIAN BUKTI
PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA
PERUBAHANNYA

Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan

Nama Perumahan / Apartemen	:	1
Nama Cluster / Tower	:	2
Nama Blok - Nomor Unit	:	3
Luas Tanah / Bangunan	:	4

No	Identitas Pembeli		Pembayaran			Bukti Pembayaran			Validasi KPP
	Nama	NPWP/NIK/ No. Paspor	Termin	Jumlah Pembayaran	PPh Terutang	KAP	KJS	NTPN/Pbk	
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1									
2									
dst.									



.....,.....,.....
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP

14
Nama 15

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Perumahan / Apartemen
- (2) Diisi dengan nama Cluster / Tower
- (3) Diisi dengan nama Blok dan nomor unit
- (4) Diisi dengan luas tanah / bangunan
- (5) Diisi dengan Nama Pembeli.
- (6) Diisi dengan NPWP atau NIK atau Nomor Paspor pembeli (pilih salah satu).
- (7) Diisi dengan termin pembayaran Pajak Penghasilan. Sebagai contoh pembayaran termin ke-2 (kedua) ditulis "2".
- (8) Diisi dengan jumlah pembayaran.
- (9) Diisi dengan PPh terutang.
- (10) Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- (11) Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- (12) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk).
- (13) Diisi oleh KPP dengan ditulis "sesuai" atau "tidak sesuai".
- (14) Diisi tanda tangan pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.
- (15) Diisi dengan nama pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.
- (16) Stempel Kantor Pelayanan Pajak.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN IVA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- ... /PJ/2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 18/PJ/2017
TATA CARA PENELITIAN BUKTI
PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA
PERUBAHANNYA

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU
PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA																																								
<p>SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN</p> <p>Nomor : 1</p> <p>TELAH DITELITI</p> <p>A. Identitas Wajib Pajak</p> <table><tr><td>Nama Wajib Pajak</td><td>:</td><td>..... 2</td></tr><tr><td>NPWP</td><td>:</td><td>..... 3</td></tr><tr><td>Alamat Wajib Pajak</td><td>:</td><td>..... 4</td></tr><tr><td></td><td>:</td><td>..... 4</td></tr></table> <p>B. Identitas Objek Pajak</p> <table><tr><td>Nama Perumahan / Apartemen</td><td>:</td><td>..... 5</td></tr><tr><td>Nama Cluster / Tower</td><td>:</td><td>..... 6</td></tr><tr><td>Nama Blok - Nomor Unit</td><td>:</td><td>..... 7</td></tr><tr><td>Luas Tanah / Bangunan</td><td>:</td><td>..... 8</td></tr></table> <p>C. Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh</p> <table><tr><td>Kode Akun Pajak</td><td>:</td><td>..... 9</td></tr><tr><td>Kode Jenis Setoran</td><td>:</td><td>..... 10</td></tr><tr><td>Masa Pajak</td><td>:</td><td>..... 11</td></tr><tr><td>Jumlah Pembayaran</td><td>:</td><td>..... 12</td></tr><tr><td>Jumlah SSP</td><td>:</td><td>..... 13</td></tr></table> <p>(Nomor BPS)¹⁴ 15 20 25 </p> <p>a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP¹⁷ (Nama)¹⁹ 18 Pelayanan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Dipungut Biaya <i>Dalam hal terdapat data yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menagih kekurangannya.</i></p> <p>Cap Kantor²⁰</p>			Nama Wajib Pajak	: 2	NPWP	: 3	Alamat Wajib Pajak	: 4		: 4	Nama Perumahan / Apartemen	: 5	Nama Cluster / Tower	: 6	Nama Blok - Nomor Unit	: 7	Luas Tanah / Bangunan	: 8	Kode Akun Pajak	: 9	Kode Jenis Setoran	: 10	Masa Pajak	: 11	Jumlah Pembayaran	: 12	Jumlah SSP	: 13
Nama Wajib Pajak	: 2																																							
NPWP	: 3																																							
Alamat Wajib Pajak	: 4																																							
	: 4																																							
Nama Perumahan / Apartemen	: 5																																							
Nama Cluster / Tower	: 6																																							
Nama Blok - Nomor Unit	: 7																																							
Luas Tanah / Bangunan	: 8																																							
Kode Akun Pajak	: 9																																							
Kode Jenis Setoran	: 10																																							
Masa Pajak	: 11																																							
Jumlah Pembayaran	: 12																																							
Jumlah SSP	: 13																																							

Petunjuk Pengisian

1. Diisi dengan Nomor Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.
2. Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3. Diisi dengan NPWP pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
4. Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
5. Diisi nama Perumahan / Apartemen.
6. Diisi nama Cluster / Tower.
7. Diisi nama Blok dan nomor unit.
8. Diisi luas tanah / bangunan.
9. Diisi dengan Kode Akun Setoran.
10. Diisi dengan Kode Jenis Setoran.

11. Diisi dengan masa pajak.
 12. Diisi dengan "terlampir".
 13. Diisi dengan "terlampir".
 14. Diisi dengan Nomor Bukti Penerimaan Surat.
 15. *Quick Response Code.*
 16. Diisi dengan tanggal Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.
 17. Paraf petugas peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.
 18. Tanda tangan pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.
 19. Nama pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.
 20. Stempel Kantor Pelayanan Pajak.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ROBERT PAKPAHAN

Lampiran Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti
 Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
 Nomor :¹
 Tanggal :¹²

Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan

Nama Perumahan / Apartemen	:	21
Nama Cluster / Tower	:	22
Nama Blok - Nomor Unit	:	23
Luas Tanah / Bangunan	:	24

No	Identitas Pembeli		Pembayaran			Bukti Pembayaran			Validasi KPP
	Nama	NPWP/NIK/ No. Paspor	Termin	Jumlah Pembayaran	PPPh Terutang	KAP	KJS	NTPN/Pbk	
	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
1									
2									
dst.									

.....²⁰
 a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP
 Cap Kantor¹⁶
 18
 Nama¹⁹

- 21. Diisi dengan nama Perumahan / Apartemen.
- 22. Diisi dengan nama Cluster / Tower.
- 23. Diisi dengan nama Blok dan nomor unit.
- 24. Diisi luas tanah / bangunan.
- 25. Diisi dengan nama pihak pembeli.
- 26. Diisi dengan NPWP atau NIK atau Nomor Paspor pembeli (pilih salah satu).
- 27. Diisi dengan termin pembayaran pajak penghasilan. Sebagai contoh pembayaran termin ke-2 (kedua) ditulis "2".
- 28. Diisi dengan jumlah pembayaran.
- 29. Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang.
- 30. Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- 31. Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- 32. Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk).
- 33. Diisi oleh KPP dengan ditulis "sesuai" atau "tidak sesuai".

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN VA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER- ... /PJ/2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 18/PJ/2017
TATA CARA PENELITIAN BUKTI
PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA
PERUBAHANNYA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP¹
KANTOR PELAYANAN PAJAK²

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK SESUAI

Nomor :³
Lampiran :⁴

Hal : Surat Pemberitahuan Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran PPh Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai

Yth.⁵
NPWP
Di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor⁶ tanggal⁷ hal⁸, dengan ini
disampaikan bahwa permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah
dan/atau bangunan yang Saudara sampaikan, tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut karena masih terdapat
kelengkapan dokumen yang tidak dilampirkan dan/atau data yang tidak sesuai, dengan rincian sebagai berikut:

a. kelengkapan dokumen persyaratan

No	Uraian Kelengkapan Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK. *)		
2.	Keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan <i>Special Purpose Company</i> atau KIK dalam skema KIK tertentu. *)		
3.	Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada <i>Special Purpose Company</i> atau KIK dalam skema KIK tertentu *)		

b. kesesuaian data penelitian formal dalam data terlampir.

Apabila Saudara telah melengkapi dokumen dan/atau menyesuaikan data tersebut, Saudara dapat
mengajukan kembali permohonan penelitian tersebut.

Demikian disampaikan.



.....,²⁰.....
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP

9

Nama¹⁰

Petunjuk Pengisian

- *) Khusus pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam skema KIK tertentu.
1. Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
 2. Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
 3. Diisi dengan nomor surat.
 4. Diisi dengan lampiran surat.
 5. Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi, NPWP dan alamat.
 6. Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak
 7. Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak.
 8. Diisi dengan hal surat Wajib Pajak.
 9. Tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
 10. Diisi dengan nama Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
 11. Stempel Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran Surat Pemberitahuan Permohonan
Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai
Nomor :
Tanggal :

Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan

Nama Perumahan / Apartemen : 12
Nama Cluster / Tower : 13
Nama Blok - Nomor Unit : 14
Luas Tanah / Bangunan : 15

No	Identitas Pembeli		Pembayaran			Bukti Pembayaran			Validasi KPP
	Nama	NPWP/NIK/ No. Paspor	Termin	Jumlah Pembayaran	PPPh Terutang	KAP	KJS	NTPN/Pbk	
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1									
2									
dst.									

....., 20.....
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP
Cap Kantor ¹⁶ 1
9
Nama 10

12. Diisi dengan nama Perumahan/Apartemen.
13. Diisi dengan nama Cluster/Tower.
14. Diisi dengan nama Blok dan nomor unit.
15. Diisi luas tanah/bangunan.
16. Diisi dengan nama pihak pembeli.
17. Diisi dengan NPWP atau NIK atau Nomor Paspor pembeli (pilih salah satu).
18. Diisi dengan termin pembayaran pajak penghasilan. Sebagai contoh pembayaran termin ke-2 (kedua) ditulis "2".
19. Diisi dengan jumlah pembayaran.
20. Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang.
21. Diisi dengan Kode Akun Pajak.
22. Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
23. Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk).
24. Diisi oleh KPP dengan ditulis 'sesuai' atau 'tidak sesuai'.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ROBERT PAKPAHAN